



IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MENGEMBANGKAN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN DIGITAL: STUDI KASUS SDN KEMANTREN 1

Lailatun Nazilah¹, Nurul Aini², Akhwani³

Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo^{1,2}, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya³
e-mail: lailazilah10@gmail.com¹, nurulaini.fkip@unusida.ac.id², akhwani@unusa.ac.id³

Diterima: 07/07/2026; Direvisi: 11/07/2026; Diterbitkan: 25/07/2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih minimnya kompetensi kewarganegaraan digital peserta didik kelas V di SDN Kemantren 1, khususnya dalam menghadapi fenomena negatif ruang digital seperti *cyberbullying*, penyebaran hoaks, dan penyalahgunaan media sosial. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam mengembangkan tiga elemen kompetensi kewarganegaraan digital peserta didik, yaitu komunikasi digital, literasi digital, serta hak dan tanggung jawab digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (*case study*). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan guru, observasi terhadap guru dan peserta didik, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber untuk menjaga kredibilitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dilakukan melalui pemanfaatan *smart TV* dan *smartphone* untuk mengakses media pembelajaran digital (*earth3dmap*, *padlet*, *wayground*), pengintegrasian nilai-nilai Pancasila pada materi "Negaraku Indonesia" selama tiga pertemuan, serta peran guru sebagai *role model* dalam etika digital. Skor kompetensi kewarganegaraan digital peserta didik meningkat dari 60% (kategori Cukup Baik) pada pertemuan pertama menjadi 80% (kategori Baik) yang stabil pada pertemuan kedua dan ketiga, meskipun masih ditemukan hambatan berupa keterbatasan kepemilikan *smartphone*, kesenjangan kecakapan digital, penyalahgunaan teknologi, dan belum tersedianya evaluasi resmi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila efektif mengembangkan kompetensi kewarganegaraan digital peserta didik secara bertahap dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendidikan Pancasila, Kompetensi Kewarganegaraan Digital

ABSTRACT

This study was motivated by the low level of digital citizenship competence among fifth-grade students at SDN Kemantren 1, particularly amid negative digital phenomena such as *cyberbullying*, hoax dissemination, and social media misuse. This study aims to describe the implementation of Pancasila Education learning in developing three elements of students' digital citizenship competence: digital communication, digital literacy, and digital rights and responsibilities. A qualitative approach with a *case study* design was employed. Data were collected through teacher interviews, classroom observations of teachers and students, and documentation studies, then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, with source triangulation to ensure data credibility. The results show that implementation was carried out through the use of a *smart TV* and *smartphones* to access digital learning media (*earth3dmap*, *padlet*, *wayground*), the integration of Pancasila values into the "Negaraku Indonesia" unit across three sessions, and the teacher's role as a *role model* for digital ethics. Students' digital citizenship competence scores increased from 60% ("Fairly Good") in the first session to a stable 80% ("Good") in the second and third sessions, despite obstacles such as limited personal *smartphone* ownership, digital skill gaps, technology misuse, and the absence of an official evaluation instrument. This study concludes that Pancasila Education learning effectively and progressively develops students' digital citizenship competence.

Keywords: Pancasila Education, Digital Citizenship Competencies





PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata pelajaran penting dalam dunia pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila juga bukan hanya sebatas mata pelajaran wajib yang berhenti di bangku sekolah tetapi juga perlu diketahui bahwa Pendidikan Pancasila berperan penting menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat. Implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar tidak hanya mengajarkan tentang wawasan kebangsaan akan tetapi juga mencakup pada prinsip-prinsip etika dan moral seperti kewarganegaraan digital dan memiliki peran sebagai media untuk menanamkan cita-cita nasional, prinsip-prinsip sosial yang terhormat dan patriotisme (Andin et al., 2024). Di era perkembangan digitalisasi yang menyeluruh di berbagai lapisan generasi dan sektor saat ini, ditemukan banyak fenomena negatif yang timbul bahkan turut menjadikan anak sekolah dasar sebagai sasarannya. Fenomena negatif tersebut seperti penyebaran berita hoaks, penyalahgunaan media sosial, perilaku intoleransi dalam dunia digital, perjudian *online*, perilaku antisosial, individualisme, *cyberbullying*, dan kasus kriminalitas di ruang digital yang semakin meningkat tiap tahunnya.

Fenomena degradasi moral ini muncul akibat minimnya kompetensi kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) yang seharusnya wajib dimiliki ketika seorang individu menggunakan teknologi atau media digital. Kompetensi kewarganegaraan digital merupakan kemampuan yang wajib dimiliki dalam upaya persiapan menghadapi tantangan teknologi. Definisi dari kewarganegaraan digital ini merujuk pada setiap aturan/ norma/ sikap individu dalam ruang digital yang pantas dan bertanggung jawab serta kebiasaan dan tingkah laku yang berpengaruh terhadap ekologi konten digital dan masyarakat digital (Digdoyo dalam Khairunisa et al., 2024). Kompetensi ini tidak hanya berfokus pada penggunaan internet yang sehat, tetapi juga mencakup literasi digital, komunikasi digital, serta hak dan tanggung jawab digital. Konsep kewarganegaraan digital ini membantu pengguna media digital untuk membedakan mana yang baik dan salah dalam bermedia sosial, sekaligus membangun keadaban digital sebagai landasan etis dalam berinteraksi di ruang siber. Sehingga kompetensi ini juga berperan menjadi batasan yang memberikan dampak konstruktif pada individu dalam menjalankan kehidupan di dunia digital.

Konsep kewarganegaraan yang di tampilkan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila mengajarkan peserta didik untuk menjadi seorang warga negara yang baik sesuai aturan yang ada dengan tetap berpedoman pada Pancasila dalam menjalani kehidupan disegala aspek. Hal ini selaras dengan buku *Global Citizenship Education Critical and International Perspectives* yang menjelaskan bahwa konsep kewarganegaraan bertujuan untuk memperkuat kohesi nasional dan berkontribusi pada pembangunan bangsa (Akkari & Maleq, 2020). Dasar inilah yang sangat penting untuk digunakan dalam konsep kompetensi kewarganegaraan digital karena dapat menjadi landasan dan batasan ketika peserta didik mulai memanfaatkan teknologi agar tidak salah jalur dan mengarah pada dampak negatif penggunaan teknologi.

Sekolah memiliki peran sangat strategis dalam membimbing anak didiknya ketika menggunakan media sosial, selain dari orang tua dan lingkungan keluarganya. Hal ini dikarenakan anak cenderung lebih terbuka pada guru dibanding orang tuanya, sehingga guru di sekolah dapat menjadi pembimbing anak dalam memanfaatkan media sosial melalui implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila. Pemanfaatan teknologi digital yang tepat dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila terbukti mampu meningkatkan minat sekaligus kesadaran digital peserta didik sekolah dasar. Implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila di tingkat sekolah dasar sangatlah penting, khususnya jenjang kelas V yang mengalami masa krusial karena berada pada tahap perkembangan kognitif dan sosial yang penting untuk dibekali



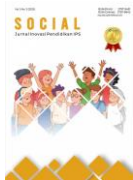


dengan kompetensi kewarganegaraan digital agar dapat menghadapi tantangan globalisasi yang semakin pesat. Hal ini didukung oleh Prasetyo & Mulyono (2025) pada penelitiannya yang bertajuk “Peran Pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam Meningkatkan Kompetensi Kewarganegaraan Digital pada Peserta Didik SMPN 1 Piyungan” yang menunjukkan bahwa apabila semakin peserta didik memahami pembelajaran Pendidikan Pancasila, maka hasilnya tingkat kompetensi kewarganegaraan digital mereka juga akan meningkat pula. Namun, penelitian tersebut masih belum spesifik merujuk pada elemen kewarganegaraan digital yang digagas oleh Mike Ribbel. Oleh karenanya, dalam dunia digital ini anak-anak dilabeli sebagai orang yang dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang juga berperan sebagai agen berdampak pada masyarakat, sehingga seharusnya sistem sekolah diharapkan dapat beradaptasi dengan tantangan dalam upaya mendukung anak-anak menjadi warga negara yang positif dalam berpartisipasi aktif di masyarakat yang semakin digital (Matiuta dalam Solehudin, 2023)

Lebih lanjut lagi, seperti yang ditambahkan oleh (Amalia et al., 2025) dalam penelitiannya yang berjudul "Kewarganegaraan Digital Sebagai Upaya Persiapan Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi" menunjukkan bahwa konsep kewarganegaraan digital memang semakin relevan untuk digunakan setiap individu sebagai dasar penggunaan teknologi saat ini. Namun, penelitian tersebut lebih berdasarkan pada studi literatur digital dengan subjek penelitian yang masih belum spesifik dan global serta berorientasi pada prinsip kewarganegaraan digital saja. Kajian terdahulu ini pun umumnya masih terbatas pada satu dimensi kompetensi digital secara parsial misalnya hanya berfokus pada literasi digital guru dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar atau implementasi literasi digital secara umum tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kekosongan inilah yang menjadi *research gap* penelitian ini: belum banyak kajian empiris di tingkat sekolah dasar yang secara spesifik mengintegrasikan tiga dimensi kompetensi kewarganegaraan digital komunikasi digital, literasi digital, serta hak dan tanggung jawab digital sekaligus dalam satu kerangka implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila pada jenjang kelas V. Sedangkan penelitian ini berfokus utama pada implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan digital di sekolah dasar yang meliputi aspek komunikasi digital, literasi digital, serta hak dan tanggung jawab digital secara terpadu dan kontekstual.

Penelitian pada topik ini dipermanis kembali oleh Mulia (2023) penelitiannya yang berjudul “Kewarganegaraan Digital pada Era Globalisasi di Indonesia” dengan jenis penelitian studi literatur. Pada penelitian Mulia kali ini, membahas mengenai implementasi kewarganegaraan digital melalui pembelajaran PKN di perguruan tinggi yang menyajikan konsep kreatif dan inovatif dalam pemanfaatan teknologi dijenjang perkuliahan dengan latar belakang perkembangan era industri 4.0. Penelitian Mulia ini menunjukkan urgensi dan strategi implementasi kewarganegaraan digital dalam ruang lingkup perguruan tinggi yang sangat penting untuk mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif dan inovatif sebagai pendukung proses pembelajaran. Sehingga topik implementasi kewarganegaraan digital di era globalisasi serba teknologi digital inilah yang menunjukkan relevansinya dengan penelitian ini. Meski demikian, penelitian Mulia ternyata masih belum cukup relevan karena pemilihan subjek yang masih belum spesifik pada perguruan tinggi mana saja hasil penelitian ini bisa direalisasikan. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi kelemahan dari penelitian Mulia dan menjadi perbedaan dengan penelitian ini yang lebih memilih peserta didik kelas V sebagai subjek penelitiannya.

Penelitian pada topik ini dipertegas kembali oleh Agir (2022) melalui penelitiannya yang bertajuk “Literasi dan Kewarganegaraan Digital: Konsep dan Strategi Implementasi



dalam Pendidikan Malaysia” dengan jenis penelitian studi literatur menjelaskan mengenai konsep dan strategi dalam literasi dan kewarganegaraan digital dalam upaya penerapannya pada bidang pendidikan di negara Malaysia. Topik yang diangkat oleh Agir pada penelitiannya ini menunjukkan bahwa strategi yang disampaikan dalam penelitian tersebut seperti pengimplementasian pendidikan kewarganegaraan digital dalam ruang lingkup pembelajaran dan pengajaran dan pentingnya literasi digital. Namun, sisi lain yang menjadi kelemahan penelitian ini terletak pada perolehan sumber data yang bersifat literatur sehingga subjek penelitian ini masih belum spesifik sehingga hasil dari penelitian ini belum tentu juga bisa untuk direalisasikan secara nyata di setiap lembaga pendidikan yang ada di Malaysia.

Relevansi penelitian Agir dengan penelitian ini terletak pada penjelasan pentingnya literasi digital dalam konsep kewarganegaraan digital dalam dunia pendidikan. Agir menjelaskan bahwa tingkat literasi digital dapat mempengaruhi nilai kemajuan suatu negara. Meski begitu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Agir ialah terletak pada proses pengambilan data Agir yang bersifat literatur dan dilaksanakan untuk pendidikan di negara Malaysia sedangkan penelitian ini melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi langsung dengan subjek penelitian yaitu peserta didik kelas V SDN Kemantren 1 Tulangan Sidoarjo.

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Kemantren 1 dengan subjek penelitian peserta didik kelas V karena ditemukan masalah terkait penggunaan teknologi atau media digital yang kurang bijak oleh peserta didik di sekolah tersebut, misalnya masih ada peserta didik yang kesulitan memastikan kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari media digital, peserta didik belum mahir dan menyadari pemanfaatan teknologi atau media digital untuk mendukung proses belajar agar lebih berkualitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kondisi belum maksimalnya kompetensi kewarganegaraan digital peserta didik di sana. Sekolah ini dipilih karena menjadi salah satu sekolah yang mendukung penuh partisipasi aktif peserta didik dalam menggunakan media sosial namun tetap sesuai pada tahap dan batasan yang harus dimiliki peserta didik. Dukungan ini diberikan melalui program, *support*, dan fasilitas agar peserta didik lebih cakap digital. Selain itu, peserta didik kelas V dipilih sebagai subjek penelitian karena memasuki usia yang penting untuk dibekali kompetensi kewarganegaraan digital untuk menghadapi masa peralihan antara anak-anak menuju remaja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (*case study*), yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan digital peserta didik kelas V di SDN Kemantren 1. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Kemantren 1, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas V SDN Kemantren 1 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, dengan guru kelas sebagai informan pendukung untuk memperoleh data terkait proses pembelajaran Pendidikan Pancasila di kelas tersebut.

Data dikumpulkan melalui empat teknik, yaitu wawancara dengan guru, observasi terhadap guru, observasi terhadap peserta didik, dan studi dokumentasi. Wawancara guru digunakan untuk menggali informasi terkait strategi dan kendala dalam mengintegrasikan kompetensi kewarganegaraan digital pada pembelajaran Pendidikan Pancasila. Observasi guru dan peserta didik dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran di kelas, sementara dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa foto kegiatan, perangkat pembelajaran, dan hasil kerja peserta didik.



Pada instrumen observasi peserta didik, data diolah menggunakan skala Likert dengan rentang skor 1 sampai dengan 5, sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Kriteria Skala Likert

Kategori	Skor
Sangat Baik	5
Baik	4
Cukup Baik	3
Tidak Baik	2
Sangat Tidak Baik	1

Skor hasil observasi selanjutnya dikonversi ke dalam bentuk persentase dan dikelompokkan berdasarkan kriteria pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Kriteria Nilai Persentase Skala Likert

Persentase (%)	Kriteria	Keterangan
81–100	Sangat Baik	Peserta didik memberikan respons yang sangat baik terhadap pelaksanaan pembelajaran
61–80	Baik	Peserta didik memberikan respons yang baik terhadap pelaksanaan pembelajaran
41–60	Cukup Baik	Peserta didik memberikan respons yang cukup baik terhadap pelaksanaan pembelajaran
21–40	Tidak Baik	Peserta didik memberikan respons yang tidak baik terhadap pelaksanaan pembelajaran
0–20	Sangat Tidak Baik	Peserta didik memberikan respons yang sangat tidak baik terhadap pelaksanaan pembelajaran

Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi/analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keempat tahapan tersebut dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga data dianggap jenuh, sehingga temuan yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan kompetensi kewarganegaraan digital peserta didik secara utuh dan mendalam. Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, yaitu dengan membandingkan dan mengecek silang data yang diperoleh dari wawancara guru, hasil observasi, dan dokumentasi, sehingga diperoleh data yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Implementasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam Mengembangkan Kompetensi Kewarganegaraan Digital

Tabel 3. Ringkasan Temuan Implementasi Pembelajaran

Aspek Temuan	Deskripsi Singkat
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi	Pemanfaatan smart TV dan smartphone untuk mengakses media pembelajaran digital (earth3dmap, padlet, wayground)
Pelaksanaan kegiatan pengembangan nilai Pancasila	Diintegrasikan pada materi bab "Negaraku Indonesia" melalui tiga pertemuan dengan topik berbeda
Guru sebagai role model	Guru menerapkan pembatasan penggunaan smartphone, etika digital, dan bahasa santun sebagai teladan langsung
Faktor penghambat	Ditemukan 4 faktor utama yang menghambat keterlaksanaan (lihat Tabel 4)

Berdasarkan Tabel 3, Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila di SDN Kemantren 1 memanfaatkan teknologi digital berupa *smart TV* dan *smartphone* untuk mengakses media pembelajaran seperti *earth3dmap*, *padlet*, dan *wayground*. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran, tetapi juga menjadi sarana pengembangan kompetensi kewarganegaraan digital peserta didik, khususnya pada elemen komunikasi digital, literasi digital, serta hak dan tanggung jawab digital.

Pengembangan nilai-nilai Pancasila diintegrasikan pada pembelajaran melalui materi bab "Negaraku Indonesia", yang dilaksanakan dalam tiga pertemuan dengan topik "Karakteristik Wilayah Indonesia", "Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", dan "Perilaku Menjaga Keutuhan NKRI". Selain itu, guru berperan sebagai *role model* melalui pembatasan penggunaan *smartphone* saat pembelajaran, penanaman etika digital, dan penggunaan bahasa yang santun, sehingga menjadi contoh langsung bagi peserta didik dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan digital.

Faktor Penghambat Implementasi

Tabel 4. Faktor Penghambat Implementasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila

No	Faktor Penghambat
1	Keterbatasan kepemilikan perangkat teknologi digital (<i>smartphone</i>) pribadi peserta didik
2	Kesenjangan kecakapan digital antarpeserta didik
3	Penyalahgunaan penggunaan teknologi digital selama proses pembelajaran
4	Belum tersedianya bentuk evaluasi resmi terkait konsep kompetensi kewarganegaraan digital

Berdasarkan Tabel 4, tiga kali observasi lapangan, ditemukan empat faktor utama yang menghambat implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan digital peserta didik (Tabel 4). Meskipun demikian, hambatan tersebut tidak menghentikan proses pembelajaran dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi guru untuk meningkatkan persiapan dan fasilitas pembelajaran ke depannya

Dampak Implementasi terhadap Kompetensi Kewarganegaraan Digital

Tabel 5. Persentase Perkembangan Kompetensi Kewarganegaraan Digital per Pertemuan

Pertemuan	Persentase	Kategori
Pertama	60%	Cukup Baik
Kedua	80%	Baik
Ketiga	80%	Baik

Berdasarkan Tabel 5, hasil pengukuran skala Likert menunjukkan peningkatan persentase perkembangan kompetensi kewarganegaraan digital peserta didik dari pertemuan pertama (60%, kategori Cukup Baik) menjadi 80% (kategori Baik) yang stabil pada pertemuan kedua dan ketiga. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak peserta didik menunjukkan perilaku yang mencerminkan pengembangan kompetensi kewarganegaraan digital seiring berjalannya proses pembelajaran.

Perkembangan Tiap Elemen Kompetensi Kewarganegaraan Digital

Tabel 6. Ringkasan Perkembangan Elemen Kompetensi Kewarganegaraan Digital

Elemen	Temuan
Komunikasi digital	Berkembang melalui pemanfaatan smart TV/smartphone untuk mengakses platform pembelajaran; guru memberi contoh komunikasi yang baik di ruang digital

Elemen	Temuan
Literasi digital	Pada pertemuan pertama ditemukan kesenjangan kecakapan pada penggunaan <i>earth3dmap</i> ; membaik pada pertemuan berikutnya melalui <i>padlet</i> dan <i>wayground</i>
Hak dan tanggung jawab digital	Terdapat ketidakseimbangan pada pertemuan pertama, namun membaik dan lebih seimbang pada pertemuan kedua dan ketiga

Berdasarkan Tabel 6, ketiga elemen kompetensi kewarganegaraan digital menunjukkan pola perkembangan yang serupa, yaitu peningkatan bertahap dari pertemuan pertama hingga ketiga. Elemen komunikasi digital berkembang melalui pembiasaan penggunaan teknologi digital dan keteladanan guru. Elemen literasi digital sempat menunjukkan kesenjangan pada pertemuan awal, tetapi membaik seiring penggunaan media pembelajaran yang lebih interaktif. Sementara itu, elemen hak dan tanggung jawab digital yang semula belum seimbang pada pertemuan pertama menunjukkan perbaikan yang konsisten pada pertemuan kedua dan ketiga.

Pembahasan

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Proses Pembelajaran

Pemanfaatan *smart TV* dan *smartphone* untuk mengakses *earth3dmap*, *padlet*, dan *wayground* pada tiga pertemuan penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital tidak lagi diposisikan sebagai distraksi, melainkan sebagai sarana yang mendukung pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan interaktif. Temuan ini sejalan dengan Saragih (2023) yang menyatakan bahwa dalam implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila di era digital ini haruslah terdapat aspek penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pengembangan nilai Pancasila dan adanya guru sebagai *role model* berfungsi sebagai media yang mampu menarik perhatian dan partisipasi peserta didik. Sehingga ketiga unsur ini mampu menciptakan perpaduan proses pembelajaran yang lebih interaktif yang relevan dengan pengembangan kompetensi kewarganegaraan digital peserta didik yang sangat dibutuhkan di era serba digital ini.

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Nilai-Nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila diintegrasikan pada setiap pertemuan, mulai dari pembiasaan salam dan doa (sila ke-1), sikap empati dan gotong royong (sila ke-2), pemahaman makna persatuan NKRI (sila ke-3), keberanian berpendapat secara santun (sila ke-4), hingga pemahaman hak dan tanggung jawab digital (sila ke-5). Kondisi ini memperkuat teori Saragih (2023) bahwa pengembangan nilai Pancasila di sekolah bertujuan menumbuhkan sikap gotong royong, kejujuran, keberanian, dan kepedulian peserta didik, yang dalam penelitian ini terbukti relevan pula diterapkan pada interaksi di ruang digital.

Guru sebagai *Role Model*

Guru berperan sebagai *role model* melalui konsistensi membatasi penggunaan *smartphone* pribadi, memberi contoh komunikasi yang sopan, serta membimbing penggunaan teknologi digital secara bijak. Hal ini selaras dengan Saragih (2023) yang menegaskan bahwa keteladanan berupa sikap saling menghargai perbedaan, bersikap adil, dan menghormati orang lain berdampak positif terhadap perkembangan peserta didik secara bertahap dan konsisten.

Faktor Penghambat Implementasi

Empat hambatan yang ditemukan keterbatasan kepemilikan *smartphone*, kesenjangan kecakapan digital, penyalahgunaan teknologi, dan belum adanya evaluasi resmi kompetensi



kewarganegaraan digital tidak menghentikan keberlangsungan pembelajaran. Keterbatasan perangkat memperkuat temuan Ginanjar et al. (2025) bahwa pengadaan infrastruktur digital perlu menjadi prioritas sekolah agar kompetensi kewarganegaraan digital peserta didik dapat berkembang optimal. Kesenjangan kecakapan digital dan penyalahgunaan teknologi turut mendukung temuan Alinata et al. (2024) tentang pentingnya kecakapan digital dalam membangun partisipasi masyarakat digital yang bertanggung jawab. Sementara itu, ketiadaan evaluasi resmi sejalan dengan Abiyuna (2023) yang menyatakan bahwa Indonesia belum memiliki standar digitalisasi pendidikan resmi untuk mengembangkan kewarganegaraan digital.

Dampak Implementasi terhadap Kompetensi Kewarganegaraan Digital

Peningkatan skor dari 60% (Cukup Baik) pada pertemuan pertama menjadi 80% (Baik) yang stabil pada pertemuan kedua dan ketiga menunjukkan bahwa pemilihan media dan metode pembelajaran yang partisipatif diskusi digital di *padlet* dan kuis interaktif di *wayground* mampu membangkitkan partisipasi peserta didik secara bertahap. Pola peningkatan ini konsisten dengan tiga elemen kompetensi kewarganegaraan digital berikut.

Komunikasi Digital. Asari et al. (2023) mendefinisikan komunikasi digital sebagai proses pemindahan informasi dari komunikator ke komunikan melalui media digital. Temuan menunjukkan perkembangan bertahap: pada pertemuan pertama partisipasi masih terbatas namun etika digital sudah baik; pada pertemuan kedua dan ketiga, indikator pemilihan media, etika, dan partisipasi digital terpenuhi secara utuh. Kondisi ini memperkuat Wati & Mardiana (2025) tentang pentingnya keadaban digital, khususnya penggunaan bahasa yang baik dan santun dalam berinteraksi di ruang digital, serta sejalan dengan Ribble (2011) yang merumuskan tiga indikator komunikasi digital: pemilihan media digital, etika digital, dan partisipasi digital.

Literasi Digital. Ribble (2015) menjelaskan literasi digital sebagai pemanfaatan media digital sebagai sumber belajar selain buku fisik. Peserta didik menunjukkan kesenjangan kecakapan pada pertemuan pertama saat menggunakan *earth3dmap*, namun membaik secara stabil pada pertemuan kedua dan ketiga melalui *padlet* dan *wayground*. Perkembangan ini sejalan dengan temuan Adikara et al. (2021) mengenai implementasi literasi digital pada siswa sekolah dasar, yang mencakup kecakapan, etika, budaya, dan keamanan digital sebagai satu kesatuan indikator literasi digital.

Hak dan Tanggung Jawab Digital. Ribble (2011) menjelaskan bahwa elemen ini mencakup edukasi mengenai hak yang diperoleh sekaligus tanggung jawab yang harus dijaga dalam penggunaan teknologi digital. Pada pertemuan pertama, hak digital (privasi dan akses informasi) sudah terpenuhi meski tanggung jawab digital belum maksimal sejalan dengan Angraini & Masyitoh (2025) tentang cakupan hak digital berupa akses, penggunaan, dan penyebaran media digital secara bertanggung jawab pada indikator etika digital dan bijak bermedia digital. Sedangkan pada tanggung jawab digital juga selaras dengan temuan Hasanah et al. (2025) tentang pentingnya tanggung jawab digital yang baik di ruang digital. Keseimbangan antara hak dan tanggung jawab tercapai pada pertemuan kedua dan ketiga, memperkuat pandangan Hakim (2022) bahwa perilaku bijak dalam bermedia digital menjadi tolok ukur kondusifitas masyarakat digital. Sikap jujur peserta didik saat mengerjakan kuis digital tanpa mencontek turut menguatkan Amalia et al. (2025) tentang keadaban digital sebagai wujud tanggung jawab pengguna teknologi. Secara keseluruhan, keselarasan hak dan tanggung jawab digital ini konsisten dengan Roza (2020) bahwa setiap individu perlu menggunakan teknologi digital secara aman dan nyaman tanpa mengancam hak orang lain.



KESIMPULAN

Pengembangan kompetensi kewarganegaraan digital dalam implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila di SDN Kemantren 1 dilaksanakan dengan pemberian pelaksanaan pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi digital sebagai media pembelajaran seperti *earth3dmap* dan pemilihan metode pembelajaran yang partisipatif seperti diskusi digital melalui *padlet* yang mengintegrasikan konsep kompetensi kewarganegaraan digital dalam proses pelaksanaannya. Adanya edukasi, bimbingan dan contoh-contoh nyata dari guru terkait penggunaan teknologi digital yang baik sesuai aturan dan tetap berpedoman pada nilai Pancasila juga menjadi salah faktor pendukung pengembangan kompetensi kewarganegaraan digital peserta didik di SDN Kemantren 1. Selain itu, pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang mengintegrasikan konsep kompetensi kewarganegaraan digital dalam bentuk penggunaan teknologi digital selama proses pembelajaran berlangsung hingga pada butir-butir pertanyaannya seperti kuis digital yang interaktif di *wayground* pun juga turut berperan sebagai pendukung terlaksananya proses pengembangan kompetensi kewarganegaraan digital peserta didik.

Dibalik terlaksananya implementasi Pendidikan Pancasila yang memang memberi dampak terhadap pengembangan kompetensi kewarganegaraan digital peserta didik kelas V di SDN Kemantren 1 tentunya juga terdapat beberapa faktor penghambat atas keterlaksanaannya ini seperti; Keterbatasan kepemilikan perangkat teknologi digital (*smartphone*) pribadi untuk mendukung proses pembelajaran saat diruang kelas, kesenjangan kecakapan digital, penyalahgunaan penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran oleh peserta didik, dan Belum tersedia bentuk evaluasi yang resmi terkait konsep kompetensi kewarganegaraan digital). Meskipun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dalma mengembangkan kompetensi kewarganegaraan digital di SDN Kemantren 1 tetap dapat terlaksana dengan baik dihari kedua dan ketiga. Adapun dampak yang terjadi setelah proses pengembangan kompetensi kewarganegaraan digital peserta didik kelas V di SDN Kemantren 1 dapat terlihat dari kegiatan sehari-hari dalam proses pembelajaran. Misalnya, di dihari pertama penelitian menunjukkan skor persentase sebesar 60% yang menunjukkan kategori “Cukup Baik”. Lalu pada hari kedua dan ketiga ditemukan peningkatan dan kestabilan dalam pengembangannya sebesar “80% yang termasuk pada kategori “Baik”. Hal ini menunjukkan apabila pemilihan media pembelajaran dari adanya penggunaan teknologi digital haruslah sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar dapat menciptakan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran menggunakan teknologi digital sehingga kompetensi kewarganegaraan digital peserta didik dapat berkebang dengan baik. Dengan demikian, hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta didik dapat menunjukkan pengembangan kompetensi kewarganegaraan digital secara lebih baik dalam proses pembelajaran dari hari ke harinya.

Jadi kesimpulannya ialah implementasi Pendidikan Pancasila ini memang dapat mengembangkan kompetensi kewarganegaraan digital peserta didik pada elemen komunikasi digital ditunjukkan melalui interaksi peserta didik diruang digital sedangkan pada elemen literasi digital ditunjukkan melalui penggunaan teknologi digital sebagai sumber belajar selain buku sedangkan pada elemen hak dan tanggung jawab dgital ditunjukkan melalui keseimbangan pelaksanaan hak dan tanggung jawab digital dalam penggunaan teknologi digital selama proses pembelajaran berlangsung. Sehingga kompetensi kewarganegaraan digital ini tidak hanya akan berkembang sebatas kemampuan teknis tetapi juga mengarah pada pemahaman peserta didik menegnai perannya dalam ruang digital.





DAFTAR PUSTAKA

- Abiyuna, T. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Dalam Mempersiapkan Warga Negara Muda Yang Smart And Good Digital Citizenship. *Jurnal Civic Hukum*, 8(November), 236–247. <https://doi.org/10.22219/jch.v8i2.27674>
- Adikara, G. J., Kurnia, N., Adikara, G. J., Kurnia, N., Adhrianti, L., Astuty, S., Wijayanto, X. A., Desiana, F., & Astuti, S. I. (2021). *Aman bermedia digital*. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. https://repository.unib.ac.id/id/eprint/12109/1/Aman_Digital_Final-2.pdf
- Agir, N. (2022). Literasi dan Kewarganegaraan Digital : Konsep dan Strategi Implementasi dalam Pendidikan di Malaysia. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 7(3), 1–9. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1367>
- Akkari, A., & Maleq, K. (2020). *Global Citizenship Education Critical and International Perspectives*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-44617-8>
- Alinata, R., Susanti, E., Atika, W., Dinillah, S., & Nirmala, D. (2024). Membangun kecakapan kewarganegaraan digital melalui implementasi PKn di era revolusi industri 4 . 0. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik (JPKP)*, 2(1), 20–29. <https://doi.org/10.61476/bnvjk578>
- Amalia, A. R., Aqida, A., & Aidah, S. (2025). Kewarganegaraan Digital Sebagai Upaya Persiapan Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi. *ICJ*, 2(1), 15–33. <https://doi.org/10.21512/icj.v2i1.12262>
- Andin, K., Pratiwi, D., Damayanti, K. R., Luh, N., Nia, P., & Ngurah, I. K. (2024). Implementasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila Berbasis Tri Kaya Parisudha terhadap Pengembangan Karakter Siswa Sekolah Dasar. *Journal on Education*, 07(01), 8453–8461. <https://doi.org/10.31004/joe.v7i1.7686>
- Angraini, R., & Masyitoh, I. S. (2025). Hak dan Tanggung Jawab Digital Siswa SMA dalam Penggunaan Teknologi Internet di Kota Padang. *Journal of Moral and Civic Education*, 9(2), 119–131. <https://doi.org/10.24036/8851312922025895>
- Asari, A., Syaifuddin Rubwati, E., Ningsi, N., Sudianto, Maria Diana, H., Adhicandra, I., & Nuraini, R. (2023). *Komunikasi Digital*. Penerbit Lakeisha. https://repository.stikomogyakarta.ac.id/385/2/Buku_Komunikasi_Digital.pdf
- Ginanjari, D., Purnama, W. W., Rahmat, A., Oktaviani, S., & Septiani, R. (2025). Implementasi Kewarganegaraan Digital sebagai Sumber Belajar oleh Guru PPKn : Strategi dan Kendala di SMAN 2 Sukabumi. *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 51–60. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4186>
- Hasanah, C. F., Urmila, T., Anggraini, S., Asyisytri, M. S., & Raisa, A. (2025). Digital Responsibility : Membangun Kesadaran Hukum Siber Di Lingkungan Sekolah SMP Negeri 14 Samarinda. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(9), 34448–34455. <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/4790/4468>
- Khairunisa, W., Febrian, A., Sundawa.Dadang, & Rahmat. (2024). Membangun Keadaban Digitalisasi Warga Negara Indonesia dalam Perspektif Pendidikan. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 4(01), 1–8. <https://doi.org/10.57008/jjp.v4i01.675>
- Mulia, L. T. (2023). Kewarganegaraan Digital Pada Era Globalisasi Di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol.*, 4(1), 1–5. <https://doi.org/10.55357/is.v4i1.321>
- Prasetyo, R. A., & Mulyono, B. (2025). Peran Pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam Meningkatkan Kompetensi Kewarganegaraan Digital Pada Peserta Didik SMP Negeri 1 Piyungan. *Media Agora:Jurnal Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 14(01),



- 599–611. <https://doi.org/10.21831/agora.v14i1.23398>
- Ribble, M. (2011). *Digital Citizenship in Schools* (Second Edi, Vol. 3777). ISTE (International Society for Technology in Education). https://www.researchgate.net/profile/Ahmed-Shaaban-25/publication/340468314_Digital_Citizenship_in_Schools_Second_Edition/links/5e8bd7244585150839c63804/Digital-Citizenship-in-School-Edition.pdf
- Ribble, M. (2015). *Digital Citizenship in School: Nine Elements All Student Should Know* (Third Edi). ISTE (International Society for Technology in Education). https://www.econcordia.co/home/sor/references/Understanding_digital_citizenship_ribbel_2015.pdf
- Roza, P. (2020). Digital Citizenship: Menyiapkan Generasi Milenial Menjadi Warga Negara Demokratis di Abad Digital. *Journal Sosioteknologi*, 18(2), 190–202. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj2020.19.2.4>
- Saragih, C. S. (2023). Implementasi Nilai Pendidikan Pancasila di Era Digital pada Siswa SDN 101964 Jaharun Kecamatan Galang. *Jurnal Inspirasi Pendidikan (ALFIHRIS)*, 1(3), 41–51. <https://doi.org/10.59246/alfihris.v1i3.273>
- Solehudin, R. H. (2023). Pengenalan Digital Citizenship di Lingkungan Sekolah Dasar. *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 9(2), 139–151. <https://doi.org/10.18860/jpips.v9i2.23392>
- Wati, I., & Mardiana, M. (2025). Kontribusi Kewarganegaraan Digital dalam Membentuk Etika Digital pada Generasi Z. *Jurnal Humaniora Dan Ilmu Pendidikan (JAHIDIK)*, 5(1), 23–34. <https://doi.org/10.35912/jahidik.v5i1.5472>